

**PENERAPAN MODAL SOSIAL PADA KEBERHASILAN
PROGRAM PEMBIAYAAN BERBASIS KELOMPOK
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS PADA KOPERASI KELOMPOK HUMANIORA POKMAS
MANDIRI, KANTOR CABANG DELI SERDANG)**

Elvira Agustina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Elviraagustina1688@gmail.com

ABSTRACT

Materials/goods collateral is the biggest obstacle for MSMEs from poor families to obtain banking services and financing facilities. Social capital as a solution applied to group-based financing programs. This study attempted to analyze the application of social capital to the success of group-based financing programs in poverty alleviation efforts at The Humaniora Group Cooperation of Pokmas Mandiri at Deli Serdang Branch. The subjects of this study consisted of observer informants from The Humaniora Group Cooperation of Pokmas Mandiri, and the perpetrator informants namely members of the cooperation. This research is a field research using a qualitative approach. Data collections techniques used in this study were in-depth interviews, documentation, observation and review of literature. Based on the results, it was obtained that 1) The application of group-based financing programs has been modified to the conditions and needs of the society in Deli Serdang Regency, both from the social, economic and cultural of the society; 2) The application of social capital in the group-based financing program is considered very effective and efficient for The Humaniora Group Cooperation of Pokmas Mandiri in assessing and deciding the eligibility of members, through trust, participation, networks and social norms as assessment characteristics; 3) the success of group-based financing in reducing poverty can be seen through evaluation and direct interviews with members using family prosperity as indicators which is applied by The Humaniora Group Cooperation of Pokmas Mandiri, that the condition of members before and after getting a loan changes, not only increases the standard of living and economy of cooperation's members, but also has an impact on their quality of life.

Keywords: *Social Capital, Group-Based Financing, Poverty Alleviation.*

Pendahuluan

Meski Indonesia sudah menjadi negara kelas menengah (*middle income*) dan anggota G-20, negara dengan besaran kue ekonomi terbesar ke-20 dunia, namun masalah kemiskinan masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah. Berbagai ahli dan lembaga menyebut bahwa yang terjadi adalah pendapatan kelompok kaya 20 persen tumbuh lebih cepat, dibanding pertumbuhan pendapatan kelompok 40 persen termiskin.¹

Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, meningkatnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 karena terjadinya inflasi, meningkatnya harga beras, selain harga beberapa bahan pokok seperti cabe rawit, gula pasir juga mengalami kenaikan harga, sementara upah buruh tani mengalami penurunan dari September 2014 hingga Maret 2015 dari Rp 39.045,- menjadi Rp 38.522,-.²

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen).³

Sedangkan untuk Provinsi Sumatera Utara angka kemiskinan mengalami sedikit penurunan dari 9,28 persen pada September 2017 menjadi 9,22 persen pada

¹ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. xxxvi.

² Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015* No.86/09/Th. XVIII, 15 September 2015.

³ Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>.

Maret 2018. Angka ini setara dengan jumlah penduduk miskin yang berada pada kisaran 1.324,98 ribu jiwa pada Maret 2018, atau hanya berkurang sekitar 1,6 ribu jiwa dalam satu semester terakhir, dari 1.326,57 ribu jiwa pada September 2017.⁴

Beberapa aspek yang berkaitan dan menjadi penyebab kemiskinan antara lain aspek ekonomi, sosial, kualitas SDM, akses terhadap sarana umum, kebebasan melakukan tindakan sosial dan keagamaan, serta akses terhadap keamanan. Mereka dikatakan miskin karena tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena, mereka tidak mempunyai pekerjaan. Selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai jika dibandingkan dengan besarnya jumlah pencari kerja, rendahnya kualitas dan kompetensi mereka juga menjadi faktor lain yang berakibat meningkatnya jumlah pengangguran. Rendahnya kualitas SDM tersebut, karena tidak ada akses untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, masyarakat miskin juga memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak azasi mereka.⁵

Kemiskinan bukanlah takdir dan budaya. Kemiskinan adalah produk salah dari pembangunan, dan akibat dari lemahnya administrasi publik, serta tidak efektifnya berbagai kebijakan publik. Dengan demikian, usaha yang terus-menerus untuk mengurangi kemiskinan secara kuantitas dan kualitas dapat dilakukan dengan menemukan strategi pembangunan yang paling sesuai, konstruksi administrasi publik yang paling efektif, dan kebijakan publik yang paling cerdas. Tugas para ilmuwan adalah terus melakukan eksplorasi keilmuan untuk menyempurnakan bangunan teoritis di satu sisi, dan memberikan gagasan – gagasan kreatif untuk prakteknya di sisi lain. Berkurangnya kemiskinan secara signifikan merupakan indikator aplikasi administrasi publik yang efektif dan kebijakan publik yang cerdas.⁶

⁴ Penduduk Miskin Sumatera Utara Maret 2018 sebanyak 1.324,98 ribu orang (9,22%), diakses dari <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/574/penduduk-miskin-sumatera-utara-maret-2018-sebanyak-1-324-98-ribu-orang--9-22-persen--.html>.

⁵ Bramantyo Didajohanputro, *Prinsip Prinsip Ekonomi Makro*, (Jakarta : Penerbit PPM, 2008), h.83.

⁶ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. v.

Upaya Pemerintah dalam hal ini juga terlihat dengan menciptakan program-program yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang terbagi ke dalam empat klaster.⁷

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belakangan ini meningkat sebanyak 0.05 persen. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi itu terlihat dari geliat kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern, melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Usaha mandiri yang dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah ini memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.⁸

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, saat ini usaha mikro dan kecil menyumbang PDB lebih banyak, yakni mencapai 93,4 persen, kemudian usaha menengah 5,1 persen, dan usaha besar hanya 1 persen saja.⁹

Meskipun UMKM ini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia, bisnis UMKM ini juga masih memiliki banyak permasalahan dan kelemahan dalam proses perkembangan dan operasionalnya. Diantaranya, permasalahan keterbatasan inovasi dan teknologi, hingga kesulitan memperoleh akses dan fasilitas perbankan dalam hal pembiayaan, untuk mengembangkan modal yang cukup terbatas. Permasalahan tersebut karena mereka (masyarakat kecil), tidak memiliki jaminan (*collateral*) sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan di perbankan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan bisnis UMKM itu sendiri.

Sebuah program yang telah sukses dijalankan dalam upaya menanggulangi masyarakat dari jurang kemiskinan, Melalui pola pembiayaan berbasis kelompok yang diterapkan pada lembaga keuangan mikro non bank seperti koperasi, dengan menerapkan modal sosial (*social capital*) sebagai pengganti jaminan fisik atau barang, yang menjadi syarat dalam pengajuan pembiayaan pada perbankan. Program

⁷ Ibid, h. 25-26.

⁸ <https://umkm-id.com/post/kontribusi-umkm-dalam-roda-perekonomian-indonesia>.
Diakses pada Tanggal 11 Maret 2020.

⁹ <https://umkm-id.com/post/kontribusi-umkm-dalam-roda-perekonomian-indonesia>.

tersebut dinamakan *Grameen Bank* yang diperkenalkan oleh Prof. Muhammad Yunus, dengan kegigihan dan usahanya, beliau berhasil mengeluarkan penduduk desa di Bangladesh dari kemiskinan.

Grameen Bank adalah sebuah bank berskala nasional yang khusus melayani masyarakat miskin di setiap desa Bangladesh. Di antara 8 juta peminjamnya, 97 persen adalah perempuan. Melalui pengalaman ditemukan bahwa peminjam perempuan mendatangkan keuntungan jauh lebih banyak bagi keluarga mereka daripada para peminjam laki-laki. Anak-anak menikmati manfaat langsung dari penghasilan ibu mereka. Perempuan mempunyai dorongan lebih kuat untuk mengatasi kemiskinan. Dan ada sebuah kesadaran bahwa meminjamkan uang kepada perempuan di pedesaan miskin Bangladesh adalah cara yang lebih berdaya guna dalam memerangi kemiskinan di masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Dewasa ini, gagasan tentang pinjaman kecil, tanpa agunan bagi kaum perempuan miskin, yang dikenal sebagai “kredit mikro” atau “*micro finance*”, telah menyebar ke seluruh dunia. *Grameen* juga masuk ke Indonesia dan replikasi program tersebut dipraktikkan pada lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan non bank lainnya seperti Koperasi, yang disebut program pembiayaan berbasis kelompok, yang sasaran fokus utamanya juga kepada kaum perempuan. Melihat latar belakang kebudayaan dan watak kaum perempuan di Bangladesh dan Indonesia cenderung sama, yakni mereka cenderung berpengaruh kuat terhadap kesuksesan dalam rumah tangganya, maka pola pembiayaan ini pun fokus kepada kaum perempuan yang memiliki usaha kecil atau yang akan memulai usaha, sebagai upaya menyejahterakan diri dan keluarga mereka. Pembiayaan yang diberikan pun bertujuan untuk mengembangkan modal usaha kecil dan mikro mereka, agar mampu bersaing dengan baik.

Salah satu koperasi yang bergerak untuk pemberdayaan masyarakat miskin terutama kaum perempuan adalah Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri yang berada di kota Medan. Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri berdiri pada tanggal 18 Juli 1983 oleh H. Harris Muda Nasution (alm) dan dilanjutkan oleh Dr.

¹⁰ Muhammad Yunus dan Karl Weber, *Bisnis Sosial: Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. xii-xiii.

Razali Harris Nasution sebagai ketua umum, yang pada awal pendiriannya berupa sebuah Yayasan. Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Humaniora, dengan mengelola pelayanan kesehatan yang berorientasi pada tindakan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Pada Tahun 1999 Yayasan Humaniora terus bermetamorfosis dan mengalami masa-masa revitalisasi, hingga Tahun 2004 menjadi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri dan memilih untuk menginisiasi berdirinya sebuah Badan Hukum Koperasi, dengan nama Koperasi Serba Usaha Pokmas Mandiri.

Koperasi ini yang secara legal-formal dan bertahap mengambil alih dan melaksanakan implementasi Program Pokmas Mandiri, dengan kriteria, visi misi dan azas yang mengutamakan pemberdayaan kaum miskin dengan titik fokus pada kaum perempuan yang akan memulai usaha atau bahkan ingin mengembangkan usaha kecil dan mikro mereka. Berkiblat pada *Grameen Bank* di Bangladesh, sebagai ilham untuk diadaptasi dan dimodifikasi dengan menyesuaikan faktor lingkungan dan karakteristik masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, Maka dasar pemikiran Koperasi ini yang sebelumnya membantu masyarakat tanpa mengambil keuntungan (*non-profit*), berjalannya waktu dan berdasarkan pengalaman berubah menjadi mendukung dan mendampingi masyarakat tetapi tidak rugi (*non-loss*). Artinya dana harus dipertahankan agar terus bergulir dan bertambah sehingga dapat digilirkan ke individu lain yang membutuhkan.

Belajar dari kesuksesan Muhammad Yunus melalui program *Grameen Bank* tersebut, agar masyarakat miskin dapat dipastikan layak mendapatkan layanan keuangan, maka jaminan atau *collateral* sebagai syarat dalam pemberian pembiayaan, bukanlah berupa jaminan fisik atau barang, namun pembiayaan yang diberikan menggunakan modal sosial (*social capital*) sebagai pengganti jaminan. Dimana, agunan pengganti ini hadir untuk menggantikan agunan fisik atau barang karena ketidakmampuan masyarakat miskin tersebut menghadirkan agunan fisik. Disinilah fungsi modal sosial berperan dalam membantu masyarakat miskin. Konsep Modal Sosial, mulai menarik perhatian dunia akademik saat ini. Berawal ketika Coleman

memperkenalkan Modal Sosial melalui tulisan yang berjudul “*Social Capital in the Creation of Human Capital*”.¹¹

Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai hubungan antara orang perorang dalam sebuah komunitas yang memiliki fungsi memfasilitasi atau mempengaruhi tindakan tertentu dari individu-individu untuk pencapaian tujuan tertentu yang tidak akan dicapai tanpa keberadaannya.¹²

Lebih lanjut, diskursus tentang modal sosial ini menjadi lebih populer melalui disertasi Putnam yang berjudul “*Making Democracy Work, Civic Tradition in Modern Italy*” dan publikasinya yang berjudul “*Bowling Alone : America’s Declining Social Capital*”. Mirip dengan Coleman, Putnam mengistilahkan modal sosial sebagai beberapa fitur dari organisasi sosial, seperti percaya (*trust*), norma (*norms*), dan jaringan (*network*), yang dapat meningkatkan efisiensi sebuah masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi dalam pencapaian kepentingan kelompok.¹³

Penelitian focus pada beberapa kriteria yang tergolong kepada modal sosial diantaranya Kepercayaan (*trust*), Partisipasi, Jaringan (*network*) dan Norma Sosial (*norms*).

Kepercayaan (*trust*) sebagai salah satu kriteria modal sosial dapat dijadikan sebagai *social collateral* untuk mendapatkan hak layanan keuangan. Begitu juga dengan Jaringan (*network*) sebagai kriteria modal sosial berikutnya. Tidak kalah penting dengan kepercayaan, bahwa jaringan merupakan hubungan interpersonal dan kerjasama antara anggota kelompok dalam pembiayaan yang dilaksanakan melalui program *Grameen Bank*. Adanya kerjasama dan pemantauan antar anggota kelompok tersebut, bertujuan untuk mencegah adanya *moral hazard* atau penyalahgunaan fasilitas pembiayaan. Modal sosial lain yaitu partisipasi dan norma sosial menjadi faktor yang juga mendukung kelancaran pinjaman.

Keberadaan modal sosial ini tidak hanya sebagai sarana untuk mengatasi berbagai hambatan, namun juga pendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat

¹¹ J.S Coleman, *Social Capital In The Creation of Human Capital* (American Journal of Sociology, 1998, h. 95-120 dalam.

¹² James S. Coleman, *The Foundation of Social Theory*, h. 302.

¹³ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, (New Jersey : Princeton University Press, 1993), h. 167.

miskin melalui pembiayaan berbasis kelompok. Keberhasilan dalam hal ini maksudnya adalah ketika setelah memperoleh pembiayaan, masyarakat miskin tersebut mampu mengubah kondisi hidupnya menjadi lebih baik, dari sebelum memperoleh pembiayaan. Seperti; telah memiliki usaha sendiri, atau dengan usaha yang telah ada sebelumnya mereka dapat mengembangkan usaha tersebut melalui pembiayaan, dan dampaknya anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang baik bahkan hingga ke Perguruan Tinggi sekalipun, dan keluarga juga mendapatkan hidup yang layak dari sebelumnya.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis praktek program pembiayaan berbasis kelompok, menganalisis penerapan Modal Sosial pada program pembiayaan berbasis kelompok, dan keberhasilan program pembiayaan berbasis kelompok dalam upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat pada Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri Kantor Cabang Deli Serdang.

Kajian Literatur

Kemiskinan

Kata fakir berasal dari bahasa arab yaitu “*al-faqr*” yang berarti tulang punggung. Dalam makna ini fakir berarti orang yang patah tulang punggungnya, karena beban yang dibawanya terlalu berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Sementara kata miskin diambil dari kata “*al-sakn*” yang berarti diam atau tenang.¹⁴

Sedangkan dalam Al-Qur’an istilah yang paling banyak digunakan untuk menyebutkan kemiskinan adalah kata *al-faqr* dan *al-maskanah*. Pelakunya disebut *faqir* atau miskin.¹⁵ Dari segi etimologis, kata *faqr* menunjukkan pada hilangnya sesuatu pada bagian tertentu termasuk di antaranya patah tulang belakang. Jadi, orang yang *faqir* seolah-olah patah tulang belakangnya karena kemiskinan dan

¹⁴Amiur Nurrudin, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*, (Bandung : Cita Pustaka Media Press, 2009),h.183.

¹⁵Faidah: ulama ahli tafsir memberikan kaidah untuk membedakan penggunaan istilah fakir dan miskin yaitu: “Sesungguhnya kata fakir dan miskin jika dikumpulkan terpisah yakni masing-masing punya arti khusus dan bila dipisah terkumpul yakni bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri. Sehingga, masing-masing mempunyai arti buat kata lain yang sejajar. Mukhtar Amin Asy-Syanqithi, *Adhwa’ Al-Bayan fi Idhah Al-Qur’an bi Al-Qur’an*, Juz V, hal. 206. Dengan demikian jika suatu ayat atau hadis hanya menyebut orang miskin atau kemiskinan secara mutlak; maka itu mencakup pula di dalamnya makna orang fakir dan kefakiran itu sendiri. Begitu pula sebaliknya.

kesengsaran.¹⁶ Juga bisa bermakna orang yang membutuhkan (*al-muhtaj*),¹⁷ kehinaan, menempel ke tanah, jatuh, dan kematian.¹⁸

Adapun kata miskin dibentuk dari fi'il madhi (kata kerja bentuk lampau) *sakana* yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak; bertempat tinggal; rendah dan hina. Miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya. Adapapun bentuk jamaknya adalah *masakin* dan *miskinun*.¹⁹ Asal kata miskin dalam bahasa adalah orang yang tunduk (*al-khadhi*)²⁰ sebagaimana dalam hadis:

اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي مِسْكِينًا، وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا، وَاحْتِزْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ

Artinya:

“Yaa Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama rombongan orang-orang yang miskin.” (HR At-Tirmidzi).

Para ekonom mempunyai pendapat yang beragam tentang kemiskinan. Ditinjau dari sisi pendapatan, kemiskinan terdiri dari dua pengertian yakni, kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif yaitu kondisi miskin akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kemiskinan relatif dan absolut adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal

¹⁶ Abdul Hushain hmad Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979) Juz IV, hal. 443.

¹⁷ Muhammad Bin Mukarram Ibnu Manzhur, *Lisan Al-‘Arab*, (Beirut: Dar Sadhir, 1979) Juz V, hal. 60.

¹⁸ Abdus Salam Al-Khurasyi, *Fiqh Al-Fuqara’ wa Al-Masakin fi Al-Kitabi wa As-Sunnah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah dan Darul Muayyid, 2002) hal. 19-22.

¹⁹ Al-Fairuz Abadi, *Qamus Al-Muhith*, Juz. 1, hal. 1556.

²⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h. 13.

dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.²¹

Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dollar dalam bentuk satuan PPP per kapita, per hari. Sedangkan, negara maju seperti Eropa Barat menetapkan 1/3 dari nilai PDB per kapita, per tahun sebagai garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia, juga memiliki beberapa model kesejahteraan dan kemiskinan. Misalnya, BPS (Badan Pusat Statistik) yang mengukur kemiskinan dengan fokus konsumsi dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang berfokus pada kesejahteraan keluarga. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memnuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (makanan; 2100 kalori per kapita per hari, ditambah pengeluaran minimum bukan makanan, seperti perumahan dan fasilitasnya berupa sandang, kesehatan, pendidikan, transport dan barang-barang lainnya).²²

Menurut Suharto ada empat penyebab kemiskinan. Pertama, faktor individual, dimana seseorang jatuh miskin karena faktor pribadi seperti cacat permanen yang mengakibatkan miskin. Kedua, faktor sosial, dimana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial. Ketiga faktor *cultural*, kemiskinan terjadi karena sifat buruk seseorang, seperti malas bekerja dan terjebak perjudian. Keempat, faktor struktural, kemiskinan terjadi akibat sistem yang tidak bisa merubah kehidupan masyarakat akibat ketidakadilan ekonomi.²³

Dalam pandangan Islam, terkait dengan kemiskinan maka yang ditekankan adalah upaya untuk perhatian, pembelaan dan perlindungan kelompok miskin yang dilakukan oleh kelompok mampu. Pihak yang mampu ini dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu kelompok miskin. Orang kaya atau orang mampu yang tidak memiliki kepedulian terhadap orang miskin dikecam dan dalam alquran dianggap sebagai pendusta agama. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 1-7.

²¹ Badan Pusat Statistik, *Analisis Perhitungan dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, (Jakarta: BPS, 2008), h. 5-6.

²² Badan Pusat Statistik, *Analisis Perhitungan dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*, (Jakarta: BPS, 2008), h. 27.

²³ Ibid, h. 70.

Selain mengecam orang kaya yang tidak peduli pada orang miskin, Islam juga mengecam orang yang malas berusaha dan tidak mau berjuang. Orang yang hidupnya dengan meminta-minta dan mengandalkan belas kasihan orang, dalam sebuah hadist Rasul SAW dinyatakan bahwa orang yang suka meminta-minta karena malas bekerja akan kehilangan wajahnya pada hari kiamat nanti. Islam menyeru umatnya untuk rajin bekerja. Banyak riwayat hadist Nabi SAW tentang keutamaan bekerja diantaranya hadist dari Abu Hurairah no. 1471.

Pemerintah telah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi kegiatan-kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan, serta koordinasi pengendalian pelaksanaan di tingkat nasional yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nasional, di tingkat provinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi, dan di tingkat kabupaten / kota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten / Kota sebagai satu kesatuan kelembagaan yang tidak terpisahkan. Secara kelembagaan, koordinasi penanggulangan kemiskinan nasional ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tindak lanjut dari Perpres tersebut di tingkat daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2009, tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.²⁴

Pemerintah telah menyusun strategi penanggulangan, membagi fokus penanganan, dan mengembangkan skema kebijakan pada 4 (empat) klaster. antara lain:²⁵

Kalster I: Program Perlindungan Sosial. Program perlindungan klaster I merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Tujuannya, untuk pemenuhan hak dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi dan air bersih, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Saran penerima

²⁴ Djonet Santoso, *Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan yang Terabaikan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 165.

²⁵ Ibid, h. 188-192.

program adalah kelompok masyarakat sangat miskin. Mekanisme pemberian bantuan bersifat langsung, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Komponen program-program penanggulangan kemiskinan klaster I terdiri dari:

- 1) Program Subsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) adalah program yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- 2) Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam rangka perlindungan terhadap resiko finansial akibat masalah kesehatan.
- 3) Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan program penanggulangan kemiskinan untuk pengembangan kualitas manusia melalui bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin.
- 4) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan kewajiban memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil / menyusui, serta menyekolahkan anak.

Kemiskinan menurut filosofi Grameen tidak hanya disebabkan oleh minimnya keterampilan, karena keterampilan tidak berbanding lurus dengan kualitas hidup seseorang. Dengan kata lain keterampilan bukan ukuran posisi sosial ekonomi seseorang. Keterampilan memerlukan dana untuk menatanya. Sementara orang miskin tidak memiliki cukup dana untuk itu. Kalaupun ada sumbangan, itu tidak menuntut pertanggung jawaban, bahkan menciptakan ketergantungan. Seperti Bantuan Langsung Tunai yang pernah dilakukan pemerintah. Keluarnya seseorang dari kemiskinan menuntut inisiatif dan kreatifitas.²⁶

Menurut Yunus, salah satu hal yang penting dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

²⁶ Subhan Kadir, *Berantas Kemiskinan Ala Muhammad Yunus*, h. 3.

Dan kelompok wanita, menurut Yunus, merupakan kelompok yang bisa berpotensi untuk diberdayakan.

Modal Sosial

Istilah modal sosial diperkenalkan oleh Lyda Judson Hanifan dalam “*The Rural School Community Center of America*” pada awal abad kedua puluh. Istilah ini mengacu pada aset tidak berwujud, seperti *goodwill*, persekutuan, simpati, dan hubungan sosial antara individu, yang mendukung terwujudnya hubungan sosial yang harmonis.²⁷

Loury menyatakan bahwa modal sosial berasal dari hubungan sosial antara masyarakat dalam memenuhi kepentingan masing-masing. Loury juga menyatakan bahwa hubungan sosial bukan hanya komponen penting dari struktur sosial, tetapi juga merupakan sumber daya yang memudahkan orang untuk mencapai kepentingan mereka yang terbaik. Lebih lanjut modal sosial adalah seperangkat sumber daya yang muncul dalam keluarga dan hubungan komunal atau masyarakat.²⁸

D. Putnam Robert mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial, seperti percaya, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Putnam menyebut ada empat elemen modal sosial yaitu *norms* (nilai-nilai sosial), *network* (jaringan), *reciprocity* (hubungan timbal balik), serta *trust* (percaya).²⁹

Hyppa dan Maki menyatakan partisipasi merupakan elemen penting dalam modal sosial yang berpengaruh terhadap kelompok. Hal ini dikarenakan semua anggota kelompok harus berpartisipasi dan berkontribusi untuk kesejahteraan kelompoknya.³⁰

Kepercayaan

²⁷ Lyda Judson Hanifan, *The Rural School Community Center, Annals of The American Academy of Political and Social Sciences*, h.130-138.

²⁸ Loury, G, *A Dynamic Theory of Racial Incomes Difference*, in P.A Wallace and A. Lemund (eds.), *Women, Minorities, and Employment Discrimination*, (Lexington Books, Lexington, MA, 1977),h.153-188.

²⁹ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy*, (New Jersey : Princeton University Press,1993), h. 167.

³⁰Markku T. Hyppa and Juhani Maki, *Social participation and health in a community rich in stock of social capital*, Health Education Research, Volume 18, Issue 6, December 2003, h.770-779.

Kepercayaan (*trust*) dimaknai sebagai “ *A firm belief in the reliability, truth or strength of a person; a confident expectation; and a reliance on the truth of a statement without examination*”. Kepercayaan adalah suatu bentuk keyakinan yang kuat, kebenaran atau kekuatan seseorang, harapan yang sangat diyakini, dan kepercayaan pada kebenaran suatu pernyataan tanpa menguji lagi.³¹

Kepercayaan adalah modal dalam membangun sebuah hubungan baik antar individu maupun dalam sebuah kelompok. Sebagai contoh, sebuah kelompok yang anggotanya menunjukkan percaya (*trust*) terhadap satu sama lain akan mencapai kesuksesan yang lebih dibandingkan kelompok yang kurang rasa percayanya terhadap sesama anggotanya.³²

Dalam ekonomi, unsur kepercayaan (*trust*) menjadi kunci terjadinya transaksi bisnis. Kepercayaan memainkan peranan penting dalam membentuk transaksi ekonomi.³³ Tidak akan terjadi deal bisnis jika para pihak tidak saling percaya pada rekan bisnisnya. Perbankan misalnya menempatkan *trust* menjadi isu sentral, kontrak kredit adalah masalah *trust* antara kreditur dan debitur.³⁴

Partisipasi

Menurut Talidzuhu Ndraha partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.³⁵

Loekman Sutrisno mendefinisikan partisipasi sebagai kerjasama yang erat antara perencanaan dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.³⁶

³¹ Fergus Lyon, *Trust, Networks and Norms: The Creation of Social Capital in Agricultural Economies in Ghana* (World Development, Vol. 28, No. 4 (2000), h.664.

³² James S. Coleman, *The Foundation of Social Theory*, h.304.

³³ Agus Eko Nugroho, *A Critical Review of The Link Between Social Capital and Microfinance in Indonesia*, h.128.

³⁴ Elaine Egdcumb and Laura Barton, *Social Intermediation and Microfinance Programs: A Literature Review, Microenterprise Best Practices* (The SEEP Network c/o, Bethesda, U.S.A, 1998), h.3.

³⁵ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan masyarakat : mempersiapkan masyarakat tinggal landas* , (Jakarta : Bina Aksara, 1987), h.102.

³⁶ Loekman Soetrisno. Menuju Partisipasi Masyarakat. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h.223.

Menurut Ross partisipasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor . faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan dan lama menetap di suatu daerah.

Jaringan

Hasbullah menyatakan modal sosial dibangun oleh kelompok yang membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan modal sosial adalah kemampuan kelompok dalam suatu organisasi untuk melibatkan diri dalam suatu hubungan jaringan sosial.³⁷

Dari perspektif ekonomi, jaringan sosial memberikan manfaat ekonomi kepada individu melalui pengurangan biaya transaksi. Logikanya adalah bahwa jaringan sosial yang kuat dapat memfasilitasi pengumpulan informasi tentang keandalan agen atau individu, serta membangun rasa saling percaya di antara anggota kelompok dan keyakinan.

Norma Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma adalah aturan atau tolak ukur, kaidah untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Keberhasilan program Pembiayaan Berbasis Kelompok

Keberhasilan asal katanya adalah hasil. Secara bahasa hasil artinya mendapat yang diinginkan, tercapai maksudnya, tidak gagal. Keberhasilan jika dikaitkan dengan program Pembiayaan artinya program pembiayaan mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan dari program pembiayaan meningkatkan kondisi ekonomi-sosial-politik masyarakat miskin dengan tersedianya lembaga yang dapat mereka pahami dan kelola sendiri. Tujuan lain adalah meningkatkan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, pendapatan keluarga dan pelestarian budaya.

³⁷Hasbullah, J. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. (Jakarta: Mr. United States, 2006).

Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri bergerak di bidang pelayanan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Jadi tujuannya mencapai tiga hal tersebut yaitu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.³⁸

Program Pembiayaan berbasis kelompok ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan. Humaniora memulai kegiatan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendapatan keluarga (*income generating*). Yang berimplikasi pada penanggulangan masalah kemiskinan .

Program pembiayaan berbasis kelompok ini merupakan replikasi dari program *Grameen Bank* di Bangladesh. Berikut pemaparan tentang *Grameen Bank* yang banyak mengilhami lahirnya program-program pemberdayaan kaum miskin lainnya pada lembaga keuangan bank maupun non bank, termasuk Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif atau disebut juga format deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus.

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, Kantor Cabang Deli Serdang, Jalan Besar Petumbukan No. 134, Dusun Tanahmerah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dengan lokasi penelitian yang tersebar di beberapa tempat, seperti : Desa Batang Kuis, Desa Tembung, Desa Laut Dendang, Desa Percut Sei Tuan dan Panglima Denai.

Subjek penelitian ini adalah informan penelitian yang terdiri dari informan pengamat yakni mereka yang berasal dari Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, baik dari unsur perangkat organisasi, seperti pengurus dan pengawas koperasi atau pemilik koperasi, maupun yang berasal dari unsur pelaksana koperasi, seperti manajer ataupun karyawan, dan informan pelaku yakni para anggota koperasi yang menerima pembiayaan dari Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri dalam mendirikan dan mengembangkan usahanya, serta sumber informasi lain yang nantinya dianggap perlu oleh peneliti untuk kelengkapan informasi dalam penelitian

³⁸ Fadmin P. Malau, *berpikir sederhana bertindak sederhana* 66 tahun dokter Rizali Haris Nasution, (Medan : Perdana Publishing), h.10.

ini..Mekanisme yang digunakan dalam memilih informan guna mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan, yakni dengan mekanisme disengaja, yang dalam Bahasa Inggris disebut *purposive*.

Sumber data yang menunjang penyelesaian penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari unsur perangkat organisasi yakni, pengurus dan pengawas koperasi atau pemilik koperasi, maupun yang berasal dari unsur pelaksana koperasi, yakni manajer dan karyawan koperasi, serta para anggota koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, dan sumber data sekunder terdiri dari literatur-literatur yang memuat tentang teori – teori yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-dept interview*), dokumentasi, observasi, dan telaah literatur (*library research*). Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), diperlukan instrumen bantuan, yang terdiri dari panduan atau pedoman wawancara mendalam, Alat rekaman, dan catatan lapangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis berkelanjutan (*ongoing analysis*).

Hasil dan Pembahasan

Jumlah penduduk Deli Serdang keadaan bulan Juni Tahun 2019 diperkirakan sebesar 2.195.709 jiwa, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018-2019 sebesar 1,86 persen. Dengan kepadatan penduduk sebesar 879 jiwa per km². Jumlah rumah tangga sebanyak 514.344 rumah tangga. Setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4 jiwa.³⁹

Pada kondisi 2019, di Kabupaten Deli Serdang terdapat 1.063.161 penduduk angkatan kerja, yang terdiri dari 1.002.187 jiwa terkategori bekerja dan sebesar 60.974 jiwa kategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka).⁴⁰

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Deli Serdang pada Tahun 2018 adalah 68,65 dan Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 5,74 persen.⁴¹

³⁹*Ibid.*, h. 59.

⁴⁰*Ibid.*, h. 61.

⁴¹*Ibid.*, h. 61.

Namun, berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif berjenis kelamin perempuan lebih besar di banding dengan laki-laki, hal ini ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Deli Serdang (Jiwa) 2019

Kelompok Umur Age Group	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	112 698	107 876	220 574
5-9	114 392	110 588	224 980
10-14	105 623	101 069	206 692
15-19	100 176	97 018	197 194
20-24	101 117	97 519	198 636
25-29	90 636	90 966	181 602
30-34	85 612	86 669	172 281
35-39	81 555	83 303	164 858
40-44	76 331	75 205	151 536
45-49	65 437	63 908	129 345
50-54	54 835	54 791	109 626
55-59	44 882	45 247	90 129
60-64	31 700	31 575	63 275
65-69	20 324	20 083	40 407
70-74	10 468	11 948	22 416
75+	9 108	13 050	22 158
Jumlah/Total	2019	1 104 894	1 090 815
	2018	1 084 679	1 070 946
	2017	1 064 206	1 050 421

Sumber/ Source: BPS Sensus Penduduk (SP) 2000 dan 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045 (Pertengahan Tahun/Juni)/ BPS 2000 and 2010 Population Census and Indonesia Population Projection 2015–2045 (mid year/June)

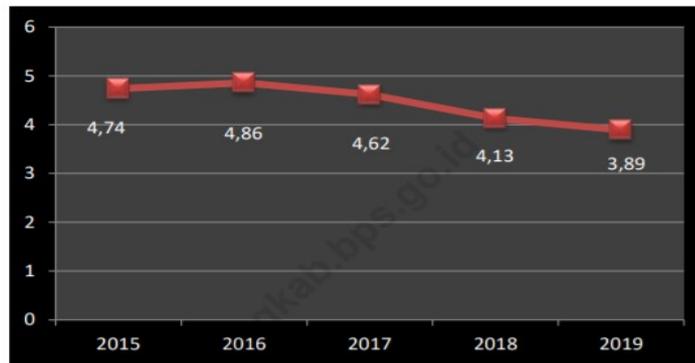
Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Deli Serdang juga tergolong masih minim, hal ini dapat dilihat dari gambar 2.3 berikut ini:

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Deli Serdang, Tahun 2019



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
 Source : Education Service of Deli Serdang Regency

Gambar 2.3
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Deli Serdang,
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara
Source : BPS-Statistics of Sumatera Utara Province

Gambar 2.4

Angka kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang mengalami sedikit penurunan dari 4,74 persen pada tahun 2015 menjadi 3,89 persen pada tahun 2019.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat dilihat, tingginya tingkat pengangguran, tingginya jumlah penduduk di usia produktif khususnya yang berjenis kelamin perempuan, dan minimnya pendidikan penduduk di Kabupaten Deli Serdang, maka hal ini membuktikan bahwa program Grameen Bank sangat sesuai diterapkan di Kabupaten Deli Serdang untuk membuka lapangan pekerjaan dengan munculnya usaha-usaha produktif di kalangan masyarakat miskin, di mana sebagian besar dari mereka masih tergolong pada jenjang pendidikan formal SD, SMP dan SMA. Program ini diwujudkan melalui pembiayaan berbasis kelompok oleh Koperasi Humaniora Pokmas Mandiri pada Kantor Cabang Deli Serdang. Program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, namun juga meningkatkan skill melalui program pemberdayaan yang ada seperti pelatihan dan lain sebagainya.

Kopersai Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, pada Kantor Cabang Deli Serdang hadir dengan program – program yang bertujuan dalam pengentasan

kemiskinan masyarakat setempat, seperti program pembiayaan berbasis kelompok sebagai replikasi dari program Grameen Bank di Bangladesh.

Kopersai Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, pada Kantor Cabang Deli Serdang memiliki 17 orang staf, yang berasal dari penduduk setempat, diantaranya: Manajer Kantor Cabang, Kordinator Operasional Lapangan, Kordinator Administrasi Keuangan, Staf Administrasi, Staf Lapangan yang terdiri dari Kordinator Pembentukan Rembuk dan Pendamping Rembuk, dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dimana Kantor Cabang Deli Serdang berdampingan dengan PAUD yang pengelolaannya juga dimiliki oleh Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, dimana PAUD tersebut didirikan untuk menampung anak-anak penduduk Desa Tanah Merah, Galang, yang ditujukan kepada keluarga miskin dengan biaya sekolah yang relatif sangat terjangkau.

Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, selain memiliki program yang bertujuan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, juga dalam operasionalnya sangat memperhatikan kesejahteraan dan pemberdayaan sumber daya manusia di lingkungan Koperasi, dengan merekrut putra dan putri daerah sebagai staf dan tenaga pendidik PAUD.

Yayasan Humaniora sendiri didirikan pada Tanggal 18 Juli 1983 di Medan. Pendiri pertamanya adalah H. Harris Muda Nasution (alm) dan Dr Rizali H. Nasution. Pada mulanya Humaniora dimaksudkan untuk mengelola pelayanan kesehatan. Dalam perjalanannya, humaniora banyak bekerjasama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga donor (*funding agency*). Namun, tidak berlangsung lama, karena pendirinya merasakan banyak kelemahan dari kerjasama tersebut. Pada tahun 1998 Humaniora bertekad untuk menjadi partisipasi masyarakat dan berkelanjutan sebagai ciri utama program.

Sejarah membuktikan bahwa perjalanan Program Pokmas Mandiri banyak mengalami kegagalan daripada berhasil, namun semangat Bapak Rizali untuk membantu kaum miskin keluar dari jeratan kemiskinan tidak pernah surut. Sebuah kunjungan beberapa staf Humaniora ke Pulau Jawa dan magang di lembaga yang telah melaksanakan replikasi Grameen Bank dan melalui analisis data yang diperoleh dari internet dan beasiswa yang diberikan Grameen Trust untuk mengikuti Grameen

Dialogue di Bangladesh akhirnya menjadi awal tonggak kebangkitan dan kesuksesan program tersebut.

Praktek Program Pembiayaan Berbasis Kelompok

Tahapan penyaluran pembiayaan

Survey Lokasi

Survei lokasi bertujuan untuk mencari dan menentukan wilayah yang menjadi target sasaran. Lokasi yang ditunjuk adalah desa-desa yang terletak di Kabupaten Deli Serdang atau daerah-daerah yang setelah diteliti kondisi masyarakatnya perlu mendapatkan pembiayaan. Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh staff lapangan Koperasi yang disebut dengan Pendamping Rembuk (PR) atau Koordinator pembentukan Rembuk (KPR).

Melakukan uji kelayakan (UK)

Uji Kelayakan adalah semacam kegiatan untuk melihat tingkat ekonomi calon anggota, yang bertujuan untuk menguji apakah seseorang cukup miskin untuk menerima pinjaman. Informasi diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan oleh PR atau KPR di rumah dan tempat usaha calon anggota. UK dilakukan untuk menjamin sampainya pembiayaan mikro Pokmas Mandiri kepada kelompok sasaran, yakni kaum perempuan termiskin.

Metode UK yang dapat digunakan antara lain: Indeks Rumah Cepat, Indeks Kepemilikan Aset, Indeks Kepemilikan Tanah, Indeks Pendapatan, Indeks Konsumsi Kalori. Pokmas Mandiri, mempergunakan Indeks Rumah Cepat (IRC), meskipun ditemukan beberapa kelemahan, namun, pengalaman menunjukkan bahwa IRC cukup efektif untuk menentukan kelayakan seseorang diterima menjadi anggota.



Gambar2.6 Uji Kelayakan di Desa Batang Kuis

Form untuk Uji Kelayakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.7 Form Uji Kelayakan

Syarat pinjaman (azas pokok) :

- 1) Tanpa jaminan maupun penjamin;
- 2) Tanpa beban bagi keluarga, jika anggota meninggal dunia maka sisa pinjaman anggota akan diputihkan setelah dipotong simpanan (ahli waris tidak dibebani pinjaman anggota);
- 3) Tanpa sanksi hukum, jika anggota gagal mengembalikan;
- 4) Tanpa didatangi, tetapi petugas mendatangi dengan proses administrasi yang sangat sederhana.

Sosialisasi / Pertemuan umum (PU)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara umum tentang lembaga dan program yang akan dilaksanakan kepada calon anggota *Grameen Bank*. Ada dua macam sosialisasi / pertemuan umum yakni:

Pertemuan umum yang mengundang dan melibatkan aparat setempat, tokoh masyarakat dan ibu-ibu calon anggota, tujuannya mengenalkan dan memberikan penjelasan tentang lembaga dan program kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman, dan mengurangi resiko kecurigaan seluruh pihak di wilayah tersebut.

Pertemuan umum secara terbatas yang hanya mengundang ibu-ibu calon anggota minimal 10 orang atau mencukupi terbentuknya 2 kumpulan.



**Gambar 2.8 Sosialisasi / Pertemuan Umum di Desa Tembung
*Latihan Wajib Kumpulan (LWK)***

Jika setelah dilaksanakan sosialisasi, calon anggota berkeinginan melanjutkan pembiayaan maka tahap selanjutnya yang harus diikuti oleh anggota adalah Latihan Wajib Kumpulan selama tiga hari berturut-turut, selama 1 jam setiap harinya, dimana anggota wajib mengikutinya, karena LWK ini merupakan pengganti jaminan fisik atau barang pada pembiayaan ini.



Gambar 2.9 Latihan Wajib Kumpulan hari ke-1 di desa Batang Kuis

PR atau KPR juga menginformasikan bahwa setiap anggota diwajibkan mengikuti simpanan wajib dan simpanan sukarela pada pertemuan rembuk, simpanan wajib sebesar Rp. 2.000,- pada pinjaman umum level satu, yakni sebesar Rp.1.000.000,-. Dimana, simpanan wajib tidak dapat diambil sewaktu-waktu, ada beberapa hal yang dibolehkannya anggota mengambil simpanan wajibnya, diantaranya: setelah melunasi pinjaman dan anggota berhenti menjadi anggota Koperasi, setelah melunasi pinjaman, anggota tidak mengambil pinjaman lanjutan, tetapi anggota ingin menjadi anggota peminjam dengan saldo mengendap minimal sebesar Rp. 5.000,- di rekening anggota, kembali ke pinjaman umum tahap awal yakni sebesar Ro. 1.000.000,-

Simpanan sukarela, dimana anggota berhak menyimpankan uangnya di Koperasi, dengan nominal minimal Rp. 1.000,- dan dapat diambil sewaktu-waktu, terutama jika sedang mengalami kesulitan membayar cicilan.

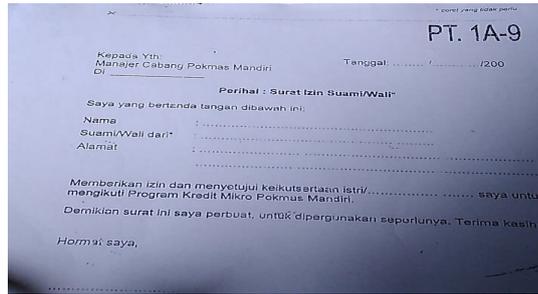
Besarnya pinjaman yang diperbolehkan diikuti anggota masyarakat, diantaranya:

Pinjaman Umum adalah tahap awal Rp. 1.000.000,- dan kelipatannya sampai dengan tahap keempat.

Pinjaman Khusus adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota, setelah berhasil melewati pinjaman umum atau setelah dievaluasi dibenarkan menerima pinjaman lanjutan.

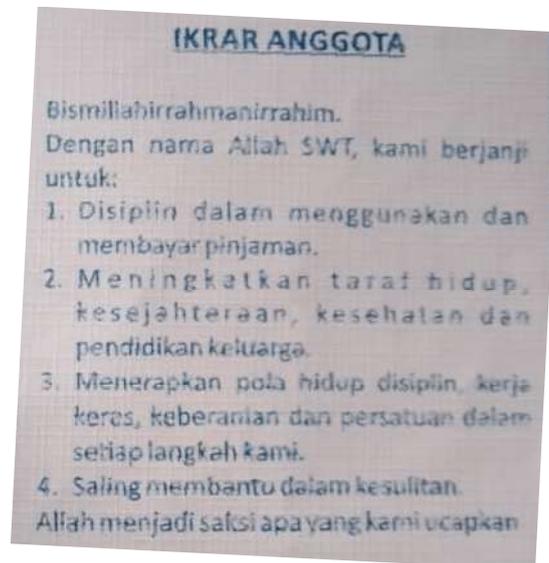
Pinjaman Tetap adalah pinjaman yang diberikan Koperasi kepada anggota yang besarnya tetap sepanjang masa, Rp. 4.000.000,-

Pada LWK pertama PR atau KPR menyerahkan Surat Izin Suami yang harus ditandatangani oleh suami anggota jika anggota ingin melanjutkan ke pengajuan pinjaman. Tujuannya agar suami anggota mengetahui jika anggota mengikuti kegiatan pertemuan rembuk hingga selesai, dan juga fotokopi KTP suami.



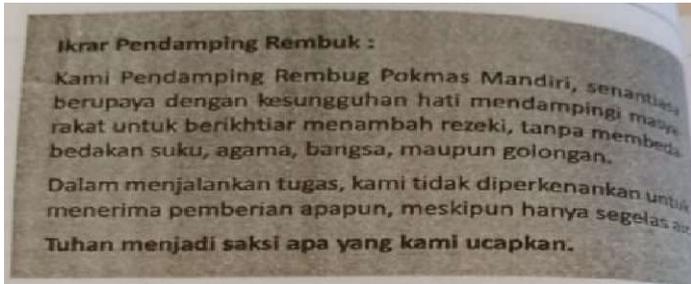
Gambar 3.1 Surat Izin Suami

Di awal dan di akhir pelaksanaan LWK setiap harinya anggota dan PR diwajibkan membacakan Ikrar Anggota selaku anggota, dan Ikrar PR selaku pendamping rembuk. Isi dari Ikrar anggota tersebut antara lain:



Gambar 3.2. Ikrar Anggota

Ikrar Pendamping Rembuk, antara lain:



Gambar 3.3 Ikrar Pendamping Rembuk

Pengajuan Pinjaman

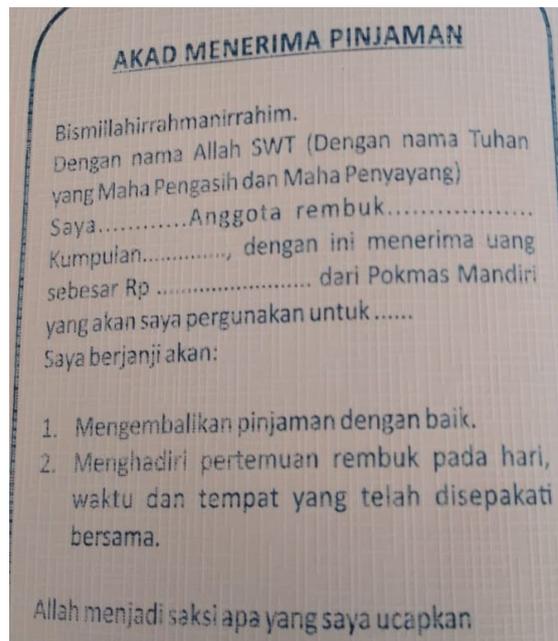
Pengajuan Pinjaman di lakukan satu minggu setelah UPK, pengajuan dilakukan secara bertahap dan bergilir seperti yang telah dijelaskan pada materi LWK hari ke-2. Dengan menandatangani beberapa form yang telah disediakan oleh pihak Koperasi.

Gambar 3.6 Form Pengajuan Pinjaman

Pencairan Pinjaman

Pinjaman yang diberikan berdasarkan permohonan anggota dan disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota, jangka waktu pembayaran cicilan pinjaman juga berdasarkan permintaan anggota. Pencairan pinjaman juga dilakukan secara bertahap dan bergilir seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan LWK hari ke-2. Anggota menandatangani form dan mengucapkan akad pinjaman, diantaranya:

- Akad anggota dan PR saat pencairan:



Gambar 3.7 Akad Anggota

Pembayaran cicilan pinjaman anggota:

Untuk jangka waktu pinjaman 50 dan 25 dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- diantaranya:

Rp. 24.400,- Angsuran / Rp. 44.800,-

Rp. 1.000,- Iuran Anggota / Rp. 2.000,-

Rp. 2.000,- Simpanan Wajib / Rp. 4.000,-

Simpanan sukarela bila ada.

Pertemuan Rembuk (Mingguan)

Pertemuan rembuk dilakukan setiap minggu, dengan tempat (rumah salah seorang anggota rembuk) dan waktu (hari dan jam) yang disepakati oleh seluruh anggota rembuk. Pertemuan rembuk diawali dan diakhiri dengan pembacaan ikrar

anggota dan PR. Dilanjutkan dengan absensi kehadiran anggota, pembayaran cicilan pinjaman, simpanan wajib dan simpanan sukarela, diselingi dengan pembahasan informasi kesehatan, dan masalah yang terjadi pada rembuk. PR juga memberi motivasi secara kekeluargaan tentang semua aspek kehidupan tujuannya adalah memberikan penguatan dan rasa percaya diri kepada ibu-ibu anggota dalam melakukan kegiatan usaha.



Gambar 3.8 Pertemuan Rembuk

Penerapan Modal Sosial

Modal Sosial yang terdiri dari kepercayaan, partisipasi, jaringan dan norma sosial telah diterapkan pada pertemuan Latihan Wajib Kumpulan selama tiga hari oleh anggota, LWK diaplikasikan sebagai pengganti jaminan fisik atau barang, sebagai syarat dalam pemberian pinjaman oleh Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, dimana pelaksanaan dan penerapannya dapat dilihat sebagai berikut:

Kepercayaan

Dalam penilaian kepercayaan, seorang PR harus dapat menilai calon anggota jujur, amanah dan dapat mengemban tanggungjawab (pembayaran cicilan dan hadir dalam pertemuan rembuk mingguan) ini dilakukan pada saat LWK hari pertama dan kedua, dimana setiap anggota diwajibkan membawa uang senilai Rp. 2000,- setiap pelaksanaan LWK selama tiga hari, sebagai dana mengikuti pelatihan LWK. Dimana uang tersebut nantinya dibagikan dan dititipkan kepada masing-masing anggota, PR atau KPR mencatat di absensi kepada siapa saja uang tersebut diserahkan dan jumlah nominalnya, tidak lupa dicatat juga nomor seri dari setiap uang. Tujuannya untuk mengetahui kejujuran dan tanggungjawab setiap anggota jika diberi amanah. Di setiap akhir pertemuan PR atau KPR akan meminta kembali uang tersebut kepada masing-masing anggota yang dititipkan dengan mengecek kesesuaian nominal dan nomor seri

dari uang tersebut. Tentu saja proses ini juga merupakan salah satu penilaian KPR dalam meluluskan atau tidaknya anggota.



Gambar 3.9 Penitipan Uang LWK

Partisipasi

Dalam partisipasi, hal yang dinilai adalah sejauh mana calon anggota berpartisipasi dalam masyarakat, biasanya semakin aktif calon anggota maka akan semakin layak dia diterima dalam anggota rembuk dan kumpulan, keaktifan tersebut biasanya dilihat dari kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pesta, perayaan hari besar, pengajian dan perkumpulan masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh lingkungan setempat. PR atau KPR juga dapat menilai calon anggota dalam kriteria ini, dengan melihat keaktifan calon anggota saat LWK, yakni pada saat PR atau KPR memberikan pertanyaan atau mengulang materi maka calon anggota dapat menjawab dengan benar dan baik atau tidak.

Jaringan

Jaringan dapat dilihat dari sejauh mana hubungan sosial dan kekerabatan calon anggota dengan anggota masyarakat lainnya. Semakin kuat hubungan sosial dan silaturahmi yang terjalin diantara anggota maka akan semakin layak calon anggota tersebut diterima oleh anggota rembuk lainnya. Jika calon anggota cenderung memiliki banyak permasalahan sosial di masyarakat, biasanya calon anggota lainnya akan menghentikan bahkan menolak calon anggota tersebut mengikuti program pembiayaan ini.

PR atau KPR biasanya menilai kriteria ini dengan melihat sejauh mana calon anggota berperan dalam memufakatkan setiap keputusan, seperti penentuan pengajuan pinjaman secara bertahap / bergulir, siapa yang lebih dulu dan siapa yang di tahap selanjutnya, biasanya calon anggota yang memiliki jaringan yang baik akan mengedepankan anggota lainnya yang memiliki kebutuhan lebih banyak, namun jika calon anggota tersebut tidak memiliki jaringan yang baik, calon anggota yang bersangkutan akan memaksakan diri berada di tahap awal tanpa memperdulikan kondisi kebutuhan teman lainnya dalam satu kumpulan.

Norma Sosial

Penerapan pada kriteria ini, dapat dilihat dari sejauh mana calon anggota menjunjung nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, seperti tidak hanya norma sosial namun juga terkadang norma agama menjadi penilaian dalam menentukan calon anggota layak atau tidak menerima pinjaman ini.

Kriteria penilaian ini dapat dilihat dari, sejauh mana sikap dan etika calon anggota dalam setiap pertemuan LWK, seperti sikap sopan santun, berpakaian rapi dan sopan, bertutur kata yang baik dan sopan, menghormati sesama calon anggota dalam satu kumpulan dan satu rembuk, menghormati dan menghargai PR, KPR ataupun petugas Koperasi lainnya yang datang ke lokasi, mengikuti setiap tahapan pertemuan dengan disiplin, tepat waktu dan tertib.

Keberhasilan Program Pembiayaan Berbasis Kelompok dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan pada Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, Kantor Cabang Deli Serdang.

Dalam hal ini, keberhasilan dapat diukur melalui dampak yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pinjaman, adakah perbedaan taraf hidup, pendapatan dan pemenuhan kebutuhan setelah mendapatkan pinjaman untuk megembangkan usaha tersebut. Berikut hasil wawancara penulis setelah mengikuti beberapa pertemuan rembuk, dengan ibu-ibu anggota Koperasi, di beberapa tempat.

Ibu Masnah Sari Nasution, ketua rembuk no. 99, rembuk Cendrawasih, usia 45 tahun, usaha warung kopi di pinggir jalan, sudah mengikuti program pembiayaan Grameen Bank selama 10 tahun, sejak 2010 dan sudah melewati 4 tahap pembiayaan pada pinjaman umum, dan saat ini menerima pembiayaan pinjaman umum tahap keempat sebesar Rp. 4.000.000,-, dengan jangka waktu pinjaman selama 25 minggu.

“Anak saya 4 orang, 2 orang yang besar sudah tidak di tanggung, sudah lulus Sekolah Menengah Atas, dan ikut anggota rembuk dalam rembuk yang sama tapi beda kumpulan, dengan usaha jualan makanan keliling seperti pecal, mie goreng, gorengan disiram kuah pecal, kue basah, dll. Yang satunya lagi jualan baju dirumahnya dipajang dirumah, terus dijajakan juga dari rumah ke rumah dan online juga”

Manfaat yang diperoleh dari menerima pinjaman Grameen Bank:

“saya sendiri sangat merasakan manfaat yang besar dari pinjaman ini mbak, karena yang awalnya 10 tahun lalu saya gak tahu mau apa, ya jualan juga butuh modal, pernah jualan tapi karena modal dikit jadi sehari jualan hhhgbesok tutup, untung sama modal habis untuk makan, dulu jualan dirumah kedei jajanan anak-anak, kadang jajanannya habis bukan karena habis dibeli tapi karena dimakan sama anak-anak, yang kecil-kecil, adeknya orang ini (sambil menunjuk kedua anaknya yang sudah dewasa), terus lama-lama setelah dapat tambahan modal dari Pokmas, saya mulai bangun lagi jualan aktif terus, sampai pada akhirnya bisa dapat tempat yang bagus pinggir jalan, sekarang saya jualan kedei kopi, lumayan juga mbak sekarang tukang-tukang becak kan banyak yang ngetem disitu, supir angkot, jadi ada juga rokok, permen, aqua, minuman botol gitulah, untuk tempat saya cuman bayar keamanan, kebersihan karena pinggir jalan jadi gak ada sewa tapi yaa setiap ada PS minta tetap kasih aja biar aman, tapi masih wajarlah gak besar kali, anak-anak sekolah dulu dari situ yang banyak bantu yaa kedei mbak, kalo bapaknya cuman supir angkot jadi gak terharap apalagi sekarang orang dah gak mau lagi naik angkot, milih yang ac trus ongkos murah, udah ada ojek online, bisa naik mobil rame-rame murah ongkosnya, jadi dulu dari kede bisa untuk makan, nambah-nambah kebutuhanlah, uang sekolah anak-anak, dll.”

Wawancara dilakukan pada pertemuan rembuk, di desa Batang Kuis.



Gambar 4.2 Ibu Masnah Sari Nasution, di Batang Kuis

Ibu Nurkholis, Ketua rembuk Asoka, di Desa Percut Sei Tuan, usia 47 Tahun, usaha warung mie sop dan es, sedang mengikuti pinjaman umum tahap awal sebesar Rp. 1.000.000,-, memiliki anak 4 orang, yang masih bersekolah.

Manfaat setelah menerima pinjaman:

“saya bersyukur sekali dipertemukan dengan petugas Pokmas, diikutsertakan kawan-kawan dalam rembuk dan kumpulan, karena kalau tidak usaha ini sudah hampir gulung tikar nak, karena ibukan anaknya empat orang, semua sekolah, tapi modal gak balik karena ayahnya kerja di pabrik berapalah gajinyakan, pas-pasan kalau mengharap semua biaya dari gaji ayahnya. Jadi dengan pinjaman itu ibu bisa buat usaha lagi, jualan juga nambah kayak es, jadi yang beli mie sop juga bisa minum es, ya alhamdulillah dengan pinjaman ini pendapatan bertambah, anak-anak tetap sekolah dari hasil jualan, bisa nambah-nambah belanja kebutuhan rumah”.



Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu Nurkholis, di Desa Percut Sei Tuan

Setelah penulis melakukan beberapa wawancara, penulis dapat melaporkan hasil dari wawancara dan pengamatan langsung bahwa program pembiayaan berbasis kelompok ini berhasil menanggulangi kemiskinan masyarakat desa Kabupaten Deli Serdang, terlihat bahwa pendapatan masyarakat miskin bertambah, anak-anak anggota dapat tetap bersekolah bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik, seperti makan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, mereka juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri, dimana hal ini berdampak pada semakin berkembangnya usaha-usaha baru UMKM ditengah masyarakat, yang tentu saja usaha-usaha ini banyak memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, penulis juga mewawancarai petugas Koperasi seperti PR, KPR, Kordinator Operasional Lapangan, Kordinator Administrasi Keuangan, dan Manajem Kantor Cabang, serta Direktur Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri yang

hasilnya dapat penulis simpulkan bahwa dalam perjalanannya, mereka melihat dan menjadi saksi hidup bahwa masyarakat miskin sangat terbantu dengan pembiayaan ini, sebelumnya mereka merasakan banyak kesulitan namun pada saat dilakukan evaluasi setelah menerima beberapa tahap pinjaman, taraf hidup anggota berubah dan semakin membaik.



Gambar 4.7 Wawancara dengan beberapa petugas dan staf Pokmas

Penilaian tersebut tentu saja melewati beberapa tahap evaluasi bagi pihak Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri terhadap kondisi calon anggota sebelum menerima pinjaman dan setelah menerima pinjaman dan menjalankan atau bahkan mengembangkan usahanya. Evaluasi tersebut dilakukan melalui mengamati secara langsung dengan melakukan survey dan wawancara kondisi perekonomian anggota, kondisi usaha, kondisi pendidikan anak-anak anggota, kondisi rumah dan lingkungannya, serta kondisi dan hal lain yang dianggap penting untuk dijadikan bahan evaluasi.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pendamping Rembuk, Kordinator Pembentukan Rembuk, dan anggota, serta pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis ke lapangan bersama PR dan KPR ke rumah-rumah anggota, dapat penulis simpulkan, bahwa keadaan calon anggota sebelum menerima pinjaman sangatlah berbeda dengan setelah menerima pinjaman, sebelum menerima pinjaman usaha mereka cenderung pasang surut, kondisi rumah juga sangat memprihatinkan, dengan pendidikan anak-anak yang harus difikirkan oleh anggota, pekerjaan suami juga terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka hal ini

menjadi tolak ukur (dijadikan sebagai pengukuran) dalam penilaian / evaluasi keadaan anggota setelah menerima pinjaman.

Setelah beberapa tahap menerima pinjaman, keadaan perekonomian anggota berubah semakin membaik dan stabil, terlihat dari anggota dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti kebutuhan pokok, seperti makan, kebutuhan anak-anak anggota, pendidikan anak-anak anggota juga semakin membaik bahkan ada sebagian yang sudah melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang perguruan tinggi, anak-anak anggota juga ada yang telah menyelesaikan pendidikan formal tertinggi dan memilih membuka usaha mengikuti jejak ibunya serta menjadi anggota Koperasi. Dari segi kondisi rumah terlihat bahwa bangunan rumah yang biasanya terlihat kumuh dan kotor semakin membaik dan terlihat rapi dan bersih setelah mereka mengikuti program ini, karena pertemuan rembuk yang dilakukan setiap minggunya di rumah-rumah anggota yang telah disepakati tempatnya membuat mereka belajar dan memahami akan pentingnya kebersihan, mereka merasa malu sendiri dengan petugas Koperasi dan anggota lainnya dalam satu rembuk, jika lingkungan dan keadaan rumah mereka kotor. Beberapa bangunan rumah yang semula terlihat kumuh juga seringkali diperbaiki bahkan direnovasi. Kondisi usaha mereka juga seringkali terlihat berubah dari kondisi awal, pendapatn yang bertambah memungkinkan anggota untuk membenahi dan menambah modal usaha mereka, aneka dagangan yang mereka pun bervariasi dan semakin menarik. Pada akhirnya, perubahan ini menjadikan mereka menjadi pribadi yang bermartabat, menambah kepercayaan diri mereka ditengah masyarakat dalam bersosialisasi.

Menurut, Ibu Endang Lestari selaku Direktur dan Wakil Ketua Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri, dalam wawancara penulis di ruangan *meeting* kantor pusat Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri di Jalan Senayan No. 4, Teladan Medan. Beliau mengatakan bahwa, Uji Kelayakan yang dilakukan Pokmas Mandiri kepada calon anggota sebelum menerima pinjaman adalah dengan menggunakan metode Indeks Rumah Cepat, dimana indikator penilaiannya dilihat berdasarkan keadaan / kondisi fisik rumah serta usaha tentunya, semakin miskin atau memprihatinkannya rumah calon anggota maka calon anggota tersebut semakin layak menerima pinjaman Pokmas. Sehingga, saat anggota telah

menyelesaikan tahap pinjaman sebelumnya, dan ingin melanjutkan tahap pinjaman berikutnya, maka Tim Pokmas Mandiri akan melakukan evaluasi kembali, dengan kriteria yang berbeda tentunya dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang dipakai dalam evaluasi (Uji Kelayakan) pada fase ini, biasanya melihat langsung perubahan kondisi rumah dan usaha anggota, serta mewawancarai anggota tentang pendapatan dari hasil usaha anggota.



Gambar 4.8 Wawancara dengan Direktur POKMAS, Ibu Endang Lestari, di Kantor Pusat POKMAS MANDIRI

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan penulis di lapangan bersama staf lapangan Pokmas Mandiri terhadap anggota.



Gambar 4.9 Wawancara dengan Kordinator Lapangan Kantor Cabang Deli Serdang

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Kordinator Operasional Lapangan, Bapak Nurmansyah dalam wawancara di Ruang Kantor Cabang Deli serdang, Desa

Tanah Merah, Kecamatan Galang. Beliau mengungkapkan bahwa, evaluasi kondisi anggota perlu dilakukan pada saat anggota menyelesaikan tahapan pinjaman umum dan akan berniat melanjutkan ke tahapan berikutnya, atau bahkan berniat melanjutkan ke tahap pinjaman khusus. Ini dilakukan agar, pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Sehingga pemanfaatan pinjaman yang diperuntukkan untuk modal usaha dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan peningkatan taraf hidup mereka. Sehingga visi, misi dan tujuan berdirinya Koperasi ini dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan harapan kita bersama.

Kesimpulan

Praktek pembiayaan berbasis kelompok pada Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri di Kantor Cabang Deli Serdang, sejatinya merupakan replikasi dari program *Grameen Bank* di Bangladesh. Dengan sasaran memberdayakan ibu-ibu kaum miskin untuk dapat melakukan usaha produktif sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai yakni memberantas kemiskinan. Praktek program pembiayaan berbasis kelompok pastinya telah mengalami modifikasi dari program yang mengilhaminya, modifikasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita. Baik dari sisi budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Penerapan Modal Sosial pada program Pembiayaan Berbasis Kelompok di Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri Kantor Cabang deli Serdang, dinilai sangat efektif dan efisien dalam menilai dan memutuskan apakah calon nasabah layak atau tidak diberikan pinjaman. Setiap calon anggota diwajibkan mengikuti Latihan Wajib Kumpulan (LWK) selama tiga hari, sebagai pengganti jaminan fisik/barang dalam persyaratan pengajuan pinjaman. Karakteristik penilaian dalam modal sosial tersebut antara lain, kepercayaan, partisipasi, jaringan sosial dan norma sosial calon anggota di lingkungan masyarakat dan dalam pertemuan rembuk yang dilakukan Koperasi. penilaian tersebut dilakukan oleh petugas lapangan Koperasi yang telah dilatih secara profesional dan berpengalaman dibidangnya. Keberhasilan pembiayaan berbasis kelompok pada Koperasi Kelompok Humaniora Pokmas Mandiri Kantor Cabang Deli Serdang, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dapat dilihat melalui evaluasi dan penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (kepada anggota dan pihak koperasi) dan pengamatan langsung di lapangan (mengamati keadaan dan

kondisi rumah dan usaha anggota) sebelum mereka mendapatkan pinjaman dan setelah menerima pinjaman. Pada prakteknya, pihak Koperasi sendiri dalam mengevaluasi anggota yang telah selesai pada tahap pinjaman sebelumnya dan ingin melanjutkan ke tahap pinjaman berikutnya menggunakan metode Indikator Keluarga Sejahtera, yang meliputi: kondisi rumah dan lingkungan, kondisi usaha, pendidikan anak-anak anggota, kestabilan pendapatan dari usaha, keterlibatan dalam masyarakat (sebagai tolok ukur penilaian bahwa anggota semakin percaya diri dalam lingkungan sosial masyarakat). Pembiayaan berbasis kelompok ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota, namun juga pada prakteknya berdampak pada peningkatan martabat kehidupan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmorowati, Sulikah, *Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2011*, No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
- Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015* No.86/09/Th. XVIII, 15 September 2015
- Berita Resmi, Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*.
- Djohanputro, Bramantyo, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta : PPM Manajemen, 2008.
- Esai-Esai Nobel Ekonomi*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007.
- Gunawan, dan Wilastomo, Mega, *Memahami Ekonomi dengan Mudah*, Yogyakarta : Penerbit Andi, 2012.
- Hamka, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2015.
- Ikbar, Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung ; PT Refika Aditama, 2014.
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karsidi, Ravik, *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah)*, Jurnal Penyuluhan Vol. 3 No.2, September 2007.
- Ketaren, Nurlela, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi Credit Union dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Koperasi Credit Union Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang)*, Jurnal Harmoni Sosial, Volume I, No. 3, Mei 2007.

Khan, Md. Ashraful Islam, *Microcredit And Grameen Bank: A View From The Grassroots*, International Journal of Current Research, Vol. 8, Issue, 11, pp.41387-41395, November, 2016.

Kuncoro, Mudrajad, *Usaha Kecil Di Indonesia: Profil, Masalah Dan Strategi Pemberdayaan*, disajikan dalam Studium Generale dengan topik “Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia”, di STIE Kerja Sama, Yogyakarta, 18 Nopember 2000.

Mainsah, Evaristus et all, *Grameen Bank: Taking Capitalism to the Poor*, Chazen Web Journal Of International Business, 2004.

Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics* 6th Edition diterjemahkan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawan dengan judul *Makroekonomi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin, et all, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : 2007.

Nurhayati, *Social Entreprenuership Muhammad Yunus “Grameen Bank”*, Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan, Vol.2 No. 1 tahun 2016.

Nuruddin, Amiur, *Ekonomi Syariah Menepis Badai Dalam Semangat Kerakyatan*, Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2009.

Sanrego, Yulizar D dan Taufik, Moch, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Jakarta : Qisthi Press, 2016.

Siagian, James Erik, *Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Deli Serdang*, Universitas Sumatera Utara, 2007.

Suryawati, Chriswardani, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, JMPK Vol. 08, No.03, September 2005.

Tampubolon, Joyakin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE))*, Jurnal Penyuluhan Vol. 2, No. 2, Juni 2006.

Tarigan, Azhari Akmal dan Agustianto(editor), *Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Medan, IAIN Press.

Widjajanti, Kesi, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011.

Yunus, Muhammad, *Building Social Business The New Kind of Capitalism That Serve Humanity’s Most Pressing Needs* diterjemahkan oleh Alex Tri Yuwono dengan judul *Bisnis Sosial Sistem Kapitalisme Baru Yang Memihak Kaum Miskin*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.